

Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing

Muhammad Makhfudz

Universitas Tama Jagakarsa, Jl. T.B. Simatupang No 152 Tanjung Barat Jakarta Selatan
e-mail: umisyanida@yahoo.com, nengyunar@yahoo.com

Abstrak. *This study found that characteristic from a effective leader indicate that "owning integrity" representing characteristic most the necessary for a leader in Indonesia and also in other nation. There by can be concluded that "owning integrity" would represent ethic for leader in Indonesia. This study also indicated that "consultative leadership style" or "pseude participation" as more style suited for Indonesia contex because tendency of the leader to use paternalistic and autoritary style. In this consultative leadership style, opinion from subordinate asked but decision remain to on-hand leader.*

Key Words: *leader characteristic, leadership style.*

1. Pendahuluan

Kepemimpinan nasional Indonesia di tengah perbatasan internasional pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah berjalannya demokrasi liberal dan transparansi. Berjalannya demokrasi yang ditandai adanya pelaksanaan pemilihan langsung, sistem ini dipilih sebagai suatu memilih pemimpin baik nasional maupun daerah yang dianggap representatif. Praktik memilih pemimpin secara langsung ini sesungguhnya mulai diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan secara langsung ini dimaksudkan sebagai mekanisme warga negara untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap, jujur dan dapat dipercaya. Sistem ini menurut para pengamat merupakan suatu bentuk perkembangan yang positif dibandingkan sistem yang terdahulu, karena telah mampu merubah panggung politik Indonesia. Menurut Donald K Emmerson mengemukakan; panggung politik pada masa orde baru hanya dikuasai sekelompok kecil elit di Jakarta. Proses di panggung politik relatif tertutup dan tidak melibatkan interaksi dengan "penonton atau rakyat", bahkan para aktor politik itu tidak banyak peduli apakah aktingnya tersebut disukai atau tidak oleh "penonton atau rakyat" (Jawa Pos 3 januari 2011). Setelah pemerintah reformasi berhasil melaksanakan pemilihan langsung pada tahun 2004 yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dunia luar langsung merespon positif dengan berjalannya sistem demokrasi. Dengan telah terpilihnya kepemimpinan nasional yang tepat, Indonesia dapat menempati posisi terhormat di dunia internasional.

Permasalahan

Masuknya Indonesia ke dalam perubahan-perubahan besar diatas, sangat disayangkan kurang diimbangi dengan kesiapan mentalitas/kematangan mental masyarakatnya. Sebagai negara bangsa, masyarakat Indonesia mulai kehilangan perilaku utama (nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Sila-sila Pancasila sebagaimana dicontohkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia), antara lain; tidak lagi menjadi bangsa yang disiplin berlandaskan pada nilai-nilai luhur atau kehormatan. Beberapa pakar bahkan menyatakan bahwa demokrasi bergerak kearah tanpa

kendali, "kebablasan" sehingga masyarakat cenderung untuk lebih memperjuangkan haknya dan cenderung melupakan melakukan peningkatan terhadap kewajibannya. Sehingga akibatnya sering terjadi gesekan antara kepentingan negara dengan rakyatnya, padahal menurut pendapat pakar politik Prof Dr Ramlan Surbakti ada beberapa alasan memilih sistem demokrasi karena banyak nilai-nilai yang lebih bersifat positif. (jurnal Konstitusi vol 7 no.5 oktober 2010) Sebagai sesuatu yang wajar bahwa manusia dalam alam modern ini hidup secara demokratis, namun dalam batas-batas tertentu menjadikan demokrasi tersebut tidak menjadi counter productive.

Pembahasan

Dalam menghadapi kondisi diatas, terasa sekali perlunya seorang pemimpin yang dapat memecahkan problematik yang bersifat krusial, permasalahan itu baik yang ada di luar baik permasalahannya yang ada di dalam. Dalam rangka mendorong proses Reformasi dan Transformasi, proses ini berkaitan dengan proses change dalam konsep manajemen organisasi dalam arti proses perubahan yang dilakukan secara teratur dan well-organized. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Jepang pada abad ke-19 yaitu pada saat kepemimpinan Kaisar Meiji. Bangsa Jepang tetap berdiri tegak berlandaskan budaya bangsa, Bushido (Dr Djokosantoso M, bahan Simposium).

Visioner

Tugas seorang pemimpin adalah membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju suatu tujuan di masa depan. Seorang pemimpin tidak akan dapat melakukan tugas bila dia sendiri tidak memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan seperti apa yang diinginkan untuk dicapai oleh dirinya bersama dengan seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Ini tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin organisasi yang berorientasi profit tetapi juga berlaku bagi semua tipe kepemimpinan organisasi non profit atau publik. Seseorang yang memiliki visi jauh kedepan tidak akan dapat menjadi pemimpin yang berhasil bila ia tidak dapat meyakinkan para pengikutnya untuk mau berubah menuju kearah yang dicita-citakannya. Seorang yang memiliki visi, memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visinya, memberi motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mau bersama-sama berjuang menuju kondisi yang dicita-citakannya dengan antara lain dengan memberikan perhatian, mau mendengarkan serta memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada orang-orang yang bekerja bersamanya.

Jujur

Nilai kejujuran bagi seorang pemimpin merupakan salah satu nilai dasar yang seharusnya atau bahkan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur sangat menghargai apa yang telah ia raih adalah berasal dari rakyat yang memperkerjakannya, sehingga seorang pemimpin sejati harus senantiasa mengingatnya dan dijadikan falsafah hidupnya. Seorang pemimpin yang sejati, adalah seorang pemimpin yang senantiasa dalam menyelenggarakan negara selalu akan menziarahi kebenaran (will to truth) dan bukan menziarahi kekuasaan (will to power), agar dia tidak mengalami apa yang disebut *split orientation*. Yaitu tidak menyatunya antara ucapan dan tindakan. Biasanya seorang pemimpin sejati setiap melaksanakan tugasnya senantiasa dilandasi dengan keikhlasan dan ridho dari yang kuasa. Kalau dalam falsafah Jawa dikenal ada istilah atau motto "*sepi ing pamrih rame ing gawe*".

Cerdas

Kecerdasan merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan modal dasar. Karena pemimpin yang cerdas adalah orang yang mampu menghargai puncak kehidupan, dan dia akan senantiasa menziarahi kebenaran (*will to truth*) dan bukan menziarahi kekuasaan (*will to power*), agar dia tidak mengalami apa yang disebut *split orientation*. Yaitu tidak menyatunya antara ucapan dan tindakan. Jika ini terjadi, dia masih dalam kategori apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai *the first man*, manusia yang hanya petunjuk secara otoriter, yang berbeda dengan kategori *the last man* yang sudah mementingkan harkat dan martabat. (Saratri Wilonoyudho, Jawa Pos desember 2010) Pemimpin seperti ini hanya bertahan sementara, dan ini telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Seperti hasil penelitian Michael Keren dan Moshe Bzuonowski yang mengatakan bahwa bekal utama pemimpin untuk “menguasai publik” adalah *popularitas dan intelektualitas*. Namun jika pemimpin ingin “bertahan lama”, intelektualitaslah yang harus dikedepankan, bukan popularitas belaka. Demikian juga Jean Laponce berpendapat, pemimpin yang populer berkat ide-idenya yang cemerlang dan cerdas, akan lebih lama bertahan bila dibandingkan dengan pemimpin yang hanya mengandalkan popularitas serta hanya retorika belaka. Pemimpin yang cerdas biasanya memiliki perilaku yang bersifat kritis dalam menanggapi beberapa sinyal-sinyal seperti yang dilontarkan pemimpin Singapura Lee Kwan Yew seperti tersebut diatas. Demikian juga ada sinyal/peringatan yang diberikan J.S Furnival tentang sifat yang klasik ada pada di wilayah Indonesia yang dikenal ciri-ciri “ masyarakat plural “ (*plural siciety*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.

Responsibel

Pemimpin yang responsibel adalah pemimpin yang melaksanakan tugas, senantiasa memiliki rasa tanggungjawab. Sehingga para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak dikerjakan secara asal-asalan saja. Pemerintah yang bijaksana memiliki arti yang lebih mendalam, yaitu tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum (otoritas) yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggungjawab (*sense of responsible*) masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai (Karhi Nisjar S;1999,123). Dalam alam demokrasi tanggung jawab menjadi sesuatu yang urgen, yaitu setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan yang akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu perilaku anak dan isterinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, sipemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut sebagai “ *public srutiny* “, terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada. (Good Governance, Joko W,2001,104).

Disiplin Perilaku

Sebagai pemimpin, sudah menjadi kewajiban mempunyai sikap yang berlandaskan pada standar moral yang tinggi yakni berbudi luhur (*character building*), selain itu seorang pemimpin harus mampu menguasai kemampuan yang tinggi untuk mewujudkan visinya yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur perilakunya dan keberanian untuk mengambil keputusan. Kemampuan tersebut harus didukung oleh kompetensi yang tinggi menyangkut pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) maupun kematangan psikologis. Agar pemimpin memiliki unsur-unsur tersebut harus memiliki sifat disiplin yang tercermin dalam sikapnya yang selalu menjaga ketepatan perilaku, misalnya seperti tepat waktu dalam melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, satunya kata dengan perbuatan “ *walk the talk* ”, perilaku konsisten dalam menimba ilmu, melakukan kewajiban sepiritualnya secara konsisten dan lain-lain. Disiplin disini adalah suatu sikap perilaku yang erat hubungannya dengan sikap yang langsung dapat dirasakan dan dimengerti oleh orang lain. Seperti halnya senantiasa menghormati dirinya sendiri bahwa perilakunya harus selalu berpedoman pada hal-hal yang memang sesuai dengan petunjuk Sang pencipta, sesuai dengan profesi seseorang misal berprofesi sebagai seorang bankir harus memiliki perilaku yang ramah terhadap setiap nasabah dan supel dalam pergaulannya, sehingga dapat mendukung kariernya dalam mengembangkan usahanya dan jauh dari perilaku yang tercela seperti menghidupkan perilaku yang mewajibkan pada setiap stafnya atau bawahannya harus setor/menyerahkan upeti pada atasannya contoh mengharuskan pada nasabah setiap kredit/ pinjaman akan dikeluarkan harus melakukan gratifikasi sebagai syarat keluarnya kredit (pinjaman). Perilaku berikutnya adalah suka menghormati orang lain, baik nasabah maupun koleganya, yang dapat mendukung kesuksesan kerjanya tidak sombong. Yang penting dalam masalah ini adalah mengembangkan sikap kebawah berupa suka membimbing, seperti kita kenal di Indonesia pernah mengenal adanya jabatan pamong praja, dimaksudkan bahwa diharap didalam diri sang pemimpin terdapat perilaku pemimpin yang selalu suka ada niat “ ngemong “ yang artinya memomong, mengelola dengan penuh kasih sayang. Tetapi biasanya yang tumbuh pada setiap pemimpin yang senantiasa sukses kemudian menduduki jabatan yang lebih tinggi, sikap atau perilaku yang muncul justru adalah perilaku atau sikap “ pangreh projo “ artinya suka menguasai, suka memerintah, menekan sombong menganggap dirinya selalu benar.

Disiplin Administrasi

Disiplin administrasi disini adalah kedisiplinan seorang pemimpin untuk melakukan pencatatan segala hal yang terjadi ditempat kerjanya yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan secara rajin rapi dan tepat yang berupa mencatat, mengkodifikasikan, menyimpan dengan rapi dan tertib, semua hal-hal yang berhubungan dengan dirinya maupun dengan lembaganya. Disiplin administrasi ini sangat membantu apabila dikemudian hari diperlukan untuk menggunakan catatan tertentu sebagai referensi suatu tindakan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seperti contoh; kerajinan mencatat kejadian-kejadian yang menyangkut diri dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya dalam buku harian, kerajinan mencatat semua hasil kerjanya dalam kesehariannya misal sertifikat dicatat dengan rapi, tertib dan menyimpannya yang rapi pula. Sehingga pada suatu waktu ditemukan kasus adanya sertifikat ganda mudah dilacak dan cepat ditemukan mana sertifikat yang asli atau sertifikat yang ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Demikian juga masalah yang menyangkut pada pejabat yang menjabat ditempat kerjanya untuk menunjang kariernya

misal daftar urut kepangkatan, dengan mencatat siapa yang harus menduduki yang paling tinggi sesuai dengan senioritas baik dari pangkatnya, pendidikan yang menjadi persyaratan dalam jabatan tersebut. Mencatat setiap surat yang masuk dengan tertib artinya sesuai dengan urutan tanggal masuknya surat, jangan sampai karena sesuatu hal misal memberi hadiah kemudian surat tersebut dimasukkan yang urutan terlebih dahulu agar mendapatkan pelayanan, tanggapan lebih dahulu. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas, mengatakan bahwa; *“asal-usul terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian yang khusus atau istimewa pada kepentingan-kepentingan sang pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan-perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda hati pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga perbuatan pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti ini dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri (Prodjohamidjojo, 2001; 11).*

Disiplin Monitoring

Seorang pemimpin yang mau sukses adalah disamping memiliki perilaku tertib, rajin mencatat, belum dikatakan sempurna bila tidak ada kesediaan untuk melakukan pemeriksaan ulang atas apa yang telah dihasilkan dari semua karya. Dalam praktek dilapangan hal tersebut sering disebutnya kontrol, salah satu strategi untuk memperbaiki prospek kontrol adalah dengan menggunakan kewenangan formal untuk menekan birokrasi untuk membagi (to share) sumberdaya terutama informasi. Mekanisme ini dirancang dan digunakan untuk mempersempit gap sumber daya antara controller dengan birokrasi dengan cara membuka lembaganya dari pengamatan publik (public examination). Hal ini birokrat harus terbuka (openness) dan transparansi terhadap publik, dimaksudkan agar publik dan controller mengetahui informasi-informasi tentang urusan-urusan lembaga birokrasi. Strategi kedua, pihak controller harus memperbaiki prospek kontrol dengan cara memperluas pemahaman, penglihatan mengenai sumber daya lain yang dimiliki oleh birokrat. Birokrat harus menjalin kerja sama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-program yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat agar tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan. Rakyat dapat melaporkan aktifitas birokrat. Informasi ini penting bagi birokrat, dan informasi ini dapat diolah sebagai ukuran kontrol. Bagaimanapun juga, strategi memecahkan monopoli birokrasi mengenai informasi bisa jadi memperbesar efektifitas sumber daya. Informasi tentang aktivitas birokrasi dapat memobilisasi rakyat yang sebelumnya apatis, dengan menginformasikannya akibat, hasil, dan konsekwensi dari tindakan birokrasi, dan karenanya dapat digunakan pula sebagai sumber daya dalam melakukan tugas kontrol mereka. Untuk mendorong kesempatan itu, struktur kontrol dapat dirancang dengan memperkuat interaksi yang lebih kuat antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih (*elected official*) dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya dalam melakukan kontrol. Hasil kontrol atas penyimpangan dari rencana, dilakukan korektif, dan hasilnya dapat dijadikan umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis pada masa yang akan datang. Namun sayangnya banyak para pemimpin kita sangat jarang yang mau menerima sosial kontrol tersebut, jadi masih menjadi sesuatu hal yang tabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel S, Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta LP3ES.
- Bennis, Warren, *On Becoming a Leader*, Massachussets.
- IGM, Nurdjana, SH, M Hum, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia 2005.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung 2000.
- Joko Widodo, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Moelyono, Djokosantoso, *More about Beyond Leadership*, Jakarta Media Komputindo, 2008.
- , *Lead !*, Jakarta, Gramedia Group, 2005.
- Restorasi Pancasila, *Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, FISIP UI Depok, 2006.
- Jurnal Konstitusi volume 7 nomor 5, Oktober 2010.
- Jurnal Legislasi Indonesia volume 3 nomor 4 Desember 2006.
- Jurnal Legislasi Indonesia volume 3 nomor 1 Maret 2007.